

## MENELISIK LIBERALISME POLITIK JHON LOCKE DAN RELEVANSINYA TERHADAP TRANSFORMASI POLITIK DI INDONESIA SAAT INI

Eduardus Makung<sup>1</sup>, Atanasius Ojan<sup>2</sup>, Fransiskus Novento Nurdin<sup>3</sup>, Agustinus Denny Lewar<sup>4</sup>  
[edumakung44@gmail.com](mailto:edumakung44@gmail.com)<sup>1</sup>, [onsiojhan@gamil.com](mailto:onsiojhan@gamil.com)<sup>2</sup>, [novenmager@gmail.com](mailto:novenmager@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[dennythejungle24@gmail.com](mailto:dennythejungle24@gmail.com)<sup>4</sup>  
Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero

### ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan liberalisme Jhon Locke dengan perubahan politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Selain itu tulisan ini mengkaji kebebasan dalam berpolitik. Akan tetapi, perubahan politik yang terjadi saat ini di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa. Para kaum elit seperti oligarki tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi diskursus yang relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia dalam ajang pemilu 2024. Dalam menggeluti tulisan ini, penulis menggunakan metode Kuantitatif. Selain itu, hasil pembahasan dari penulisan ini diambil dengan menggunakan studi kepustakaan, melalui buku-buku, journal-artikel serta media masa.

**Kata Kunci:** Jhon Locke, Liberalisme, Oligarki, Kekuasaan, Demokrasi.

### PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini isu tentang politik semakin memanas. Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh banyaknya opini publik prihal perubahan politik yang terjadi secara mendadak di Indonesia. Perubahan politik yang dimaksud bukan saja berkaitan dengan undang-undang yang berwenang, melainkan metode atau langkahnya. Dalam perkembangannya begitu banyak gugatan publik yang menyuarakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Gugatan publik ini merupakan suara masyarakat yang memiliki keprihatinan atas apa yang telah terjadi. Dalam menelisik gugatan ini, kita mesti mencari tahu apa yang menjadi persoalan dasar dari perubahan politik tersebut.

Jika mengacu pada pandangan demokrasi modern, secara substansial Indonesia sudah lama bukan lagi sebuah negara demokrasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh tradisi-tradisi yang bertentangan. Dalam hal ini ada dua tradisi yang berbeda yang bersifat dilematis. Di satu sisi ada tradisi liberal, di mana tradisi ini lebih menekankan pada hak-hak asasi manusia, peraturan hukum serta kebebasan individu. Di lain pihak ada tradisi demokratis yang berlandaskan pada kesetaraan identitas antara pemerintah dan masyarakat umum serta kedaulatan rakyat. Akan tetapi kesetaraan tersebut tergerus abis saat negara Indonesia kembali berpapasan dengan pemilu. Realitas yang terjadi dalam ajang pemilu 2024 menampilkan adanya sikap egois antara pihak yang berkuasa. Sikap ini menunjukkan adanya keinginan untuk berkuasa tanpa memperhatikan dengan yang lain. Apa yang terjadi saat ini di Indonesia merupakan suatu bentuk nepotisme modern di mana segala proses hukum berada ditangan yang berkuasa.

Para pejabat pemerintahan seolah-olah melakukan perbuatan-perbuatan yang immoral karena rakus, keinginan untuk berkuasa atau loyal kepada keluarga dan kroninya. Benar bahwa apa yang saat ini terjadi ialah sesuatu yang relevan dengan ungkapan tersebut. Dari perspektif etika, pesta demokrasi yang diselenggarakan saat ini merupakan suatu bentuk chaos yang membawa dampak besar bagi dinamika politik Indonesia kedepannya. Selain itu secara hukum dan undang-undang pun mengatakan bahwa pesta

demokrasi saat ini merupakan suatu ajang yang mengalami ketimpangan secara hukum.

## **METODE**

Dalam mengumuli tulisan ini, penulis menggunakan metode kognitif di mana dalam penulisan ini, penulis tidak menampilkan data dengan menggunakan angka. Dalam metode kognitif ini penulis menggunakan teori kepustakaan sebagai sumber penulisan. Lewat buku-buku perpustakaan pribadi, artikel jurnal dan internet sebagai sarana sumber atau referensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mengenal Liberalisme Jhon Locke**

Liberalisme merupakan suatu bentuk pemahaman yang berorientasi pada kebebasan individu. Jhon Locke adalah seorang tokoh yang menjadi fondasi awal dalam menyuarakan paham liberalisme. Ia lahir di Wrington, Inggris pada tanggal 28 Agustus 1632. Jhon Locke merupakan orang pertama sekaligus sebagai seorang filsuf yang menghimpun gagasan secara terpadu perihal dasar konstitusi demokratis. Dalam hal ini individu memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam menggapai sesuatu. Pandangan ini mulai berkembang pada abad 18-19 di Prancis dan Inggris dengan penekanan pada kebebasan individu untuk mewujudkan kesejahteraan melalui perubahan dan inovasi organisasi sosial. Dalam perkembangannya paham liberalism ini berkembang pada berbagai aspek, diantaranya ialah aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik. Perkembangan yang begitu pesat menjadikan liberalisme menjadi suatu ideologi yang bertumpu pandangan hidup humanisme. Pandangan hidup humanisme merupakan aliran yang berusaha mengedepankan rasa perikemanusiaan. Liberalisme itu sendiri dibangun atas distingsi yang tegas antara masalah keadilan dan konsep hidup yang baik, moralitas publik dan moralitas privat atau politik dan agama.

### **Liberalisme vs Demokrasi**

Liberalisme dan demokrasi adalah dual hal yang di hidupi dalam perpolitikan di Indonesia saat ini. Liberal (bebas) berserbangan dengan demos yang selalu menekankan kesetaraan. Di sini secara gamblang terpampang pembatasan antara “kami” dan “mereka”. Ini adalah sebuah bentuk demokrasi yang paradoksal, di mana kebebasan individu serta hak-haknya dibatasi dengan keputusan demokratis. Dalam demokrasi liberal batasan-batasan kerap kali ditempatkan dalam penggunaan kedaulatan rakyat. Kebebasan individual selalu berorientasi pada kedaulatan rakyat. Dalam dunia perpolitikan di Indonesia, kedaulatan rakyat adalah tujuan utama dari demokrasi tersebut. Keutamaan dari kedaulatan ini merujuk pada suatu keadilan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Keadaan sejahtera masyarakat dilihat sebagai suatu keadaan alamiah, keadaan merdeka. Keadaan alamiah itu sendiri berdiri diatas hukum alam yang mengatur setiap orang serta mengajarkan manusia untuk saling menghargai, memahami bahwa manusia memiliki derajat yang sama. Kesamaan derajat dalam diri manusia tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk bertindak secara bebas. Kebebasan adalah primodialisasi yang mutlak dari setiap individu. Kebebasan individu dalam berdemokrasi dipandang sebagai sesuatu yang baik adanya bila kebebasan itu setara dengan aturan-aturan atau batasan-batasan yang berlaku. Hal yang menjadi dasar dalam demokrasi adalah adanya kesetaraan antara masyarakat. Di sini masyarakat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang mengambil bagian dalam demokrasi. Akan tetapi, dunia demokrasi menuntut kebebasan individual. Artinya bahwa antara demokrasi dan kebebasan individu mestinya berjalan beriringan. Hal yang mau ditekankan ialah kebebasan individu bukanlah hal yang mendasar untuk berkuasa.

Dinamika demokrasi negara Indonesia saat ini mengalami suatu problem serius dan mencuat. Hal ini ditandai oleh adanya pembakangan terhadap konstitusi. Pembakangan yang secara esensial ialah terjadinya perubahan batas umur cawapres, dari usia 40 tahun diubah menjadi 35 tahun. Penyelewengan ini terjadi karena adanya pihak individu yang memainkan peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Seperti yang tengah terjadi, peran kekuasaan individu menjadi penentu demokrasi Indonesia saat ini. Kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam berdemokrasi saat ini merupakan sebuah tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia. Sebagai tantangan terbesar, penyelewengan ini juga menjadi sebuah bentuk penindasan terhadap kebebasan individu dalam berpolitik. Di sisi lain kebebasan individu yang dianut oleh Jhon Locke membawa dampak dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Hal ini relevan dengan yang telah terjadi. Bahwasannya kebebasan individu seorang pemimpin menghasilkan suatu perubahan baru bagi sistem demokrasi Indonesia saat ini. Hal ini ditandai adanya pergeseran hak Mahkamah Konstitusi (MK) oleh seorang pemimpin negara. Ini merupakan suatu bentuk pencaturan politik yang buruk, tidak mematuhi regula-regula yang ada. Selain itu, perubahan usia sebagai cawapres yang terjadi menjadi isu politik yang tidak akan habis dibicarakan.

### **Diskursus Politik Di Indonesia Saat Ini: Oligarki Problematika Yang Esensial Di Indonesia**

Oligarki adalah diskursus yang sedang mengecekram sistem politik di Indonesia. Oligarki itu sendiri merupakan suatu bentuk kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki pengaruh dalam suatu pemerintah. Orientasi dari bentuk kekuasaan seperti ini ialah hanya semata-mata untuk mereka yang berkuasa. Fenomena ini mengacu pada transformasi politik di Indonesia saat ini. Transformasi politik ini dilatarbelakangi oleh adanya dominasi kekuasaan material dalam percaturan politik. Percaturan politik seperti ini adalah sebuah problem dan tantangan dalam sebuah ajang pemilu. Dalam realitas yang terjadi di Indonesia saat ini, begitu banyak opini publik yang membahas masalah oligarki. Diskursus seperti ini sangat berdampak pada demokrasi Indonesia. Kehendak bebas setiap orang untuk berpartisipasi dalam demokrasi cenderung jatuh dan mengalami kekalahan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kehendak untuk berkuasa menurut kemauan diri sendiri. Di sini kaum oligarki semakin berkuasa, sedangkan kaum proletar semakin melarat dalam keterpurukan. Jika dilihat dari rekam jejak adanya oligarki, kaum kapitalis adalah fondasi atau dasar lahirnya oligarki. Keterlibatan kaum kapitalis dalam sebuah demokrasi dapat memantik kaum oligarki untuk merebut kekuasaan. Hal ini bukanlah soal yang baru dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan politik manusia. Tentang oligarki dan kaum kapitalis merupakan sebuah diskursus yang sangat relevan dengan situasi politik di Indonesia saat ini. Kaum kapitalis dengan segala kepunyaanya menjadi pelopor percaturan politik.

Di Indonesia, para oligarki ini mulai bertumbuh pada era demokratisasi dan desentralisasi sejak tahun 1998 sampai ini. Dalam realitas saat ini, kaum oligarki senantiasa berada dalam situasi persaingan yang hebat. Persaingan yang sangat sengit ini semata-mata hanya untuk memperkuat hegemoniya dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Pertarungan-pertarungan yang terjadi antar-oligarki untuk merebut pengaruh atau hegemoni. Pertarungan-pertarungan yang begitu hebat membuat rakyat kecil menjadi korban. Dalam situasi ini, di manakah demokrasi yang selalu digaungkan? Di sini rakyat tidak lagi asal dan tujuan dari demokrasi, melainkan keberadaanya telah direduksi hanya sebagai voters dalam setiap ajang pemilu. Eksistensi kaum oligarki dalam dunia politik berorientasi pada keinginan atau hasrat kekayaan. Keinginan ini bukan lain ialah suatu

kebahagiaan dan utilitarisme. Konsep eudamoniansme dan utilitarianisme merupakan konsep yang esensial dalam kehidupan bersama dalam suatu komunitas negara. Ironisnya banyak orang kaya dengan kekayaannya yang ada selalu berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan kebahagiaan yang universal tetapi kebahagiaan pribadi. Dalam tatanan hidup bersama, yang miskin tetap menjadi miskin tetapi yang kaya tetap dan berjuang untuk melebihi apa yang mereka miliki. Hal ini merupakan bentuk kekuasaan yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam dunia politik Indonesia pun memiliki hal yang sama. Bahwasannya mereka yang memiliki kekayaan dan harta yang melimpah diangkat menjadi pejabat dalam tampuk pemerintahan. Tentang kebahagiaan, banyak pemikir mengajarkan bahwa kebahagiaan merupakan paradoks terbesar dalam kehidupan manusia, dan kita tidak bisa mengelak akan hal itu. Bagi Bentham, manusia memiliki dorongan alamiah untuk terus memburu kepuasan, dengan tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Faktanya demikian dan relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Kaum oligarki selalu menampilkan diri sebagai sponsor dalam berpolitik. Dengan kemajuan yang ada mereka terobsesi dengan kebahagiaan.

### **Relevansi Liberalisme Politik Jhon Locke Terhadap Transformasi Politik Di Indonesia**

Kebebasan individual dalam politik Liberalisme Jhon Locke memiliki corak baru dalam sistem perpolitikan di Indonesia saat ini. Bagi Jhon Locke, kebebasan individu dalam berpolitik adalah suatu jalan atau metode yang baik mencapai sebuah kesetaraan serta kebaikan umum (*bonum commune*). Akan tetapi dalam pesta politik yang diselenggarakan dalam ruang demokrasi mengartikan liberalisme sebagai kebebasan yang berorientasi pada kesejahteraan individual, maupun sekelompok orang tertentu yang tergolong sebagai kaum oligarki maupun kapitalis.

Demokrasi di Indonesia sudah lama mengalami disorientasi. Demokrasi di Indonesia yang sedang terjadi saat ini menunjukkan suatu perbedaan yang amat dalam. Saat ini, demokrasi yang pada dasarnya bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat telah berubah menjadi sebuah demokrasi yang hanya menguntungkan segelintir orang tertentu. Demokrasi seperti ini menunjukkan ketidaksetaraan antara kaum elit dan proletar. Di sini, kebebasan individu untuk memperoleh kesejahteraan dan kesetaraan dalam suatu negara telah sirna. Kebebasan individu serta kesetaraan dalam demokrasi liberal tidak bisa didamaikan. Dalam realitas politik di Indonesia saat ini, begitu banyak kaum elit yang membeli suara rakyat dengan uang. Hal ini sebuah contoh tindakan yang tidak menghargai martabat manusia dalam bidang politik. Hak pilih di tawari dengan jumlah uang yang relatif dari setiap calon. Di sini kebebasan seseorang individu dalam berpolitik mengalami penurunan. Dalam hal ini seseorang yang memiliki keinginan untuk bergabung dalam dunia politisi mesti memiliki uang yang cukup. Ada uang, pasti menang, inilah ending akhir dalam pemilu atau proses perpolitikan di Indonesia.

Realitas seperti ini berdampak pada mental masyarakat proletar yang tidak memiliki banyak uang. Akan tetapi, kaum kapitalis dan kaum oligarki menggunakan kehendak-bebasnya untuk menguasai kaum sederhana demi kepentingan pribadi. Di tengah situasi seperti ini, banyak gugatan publik yang menginginkan suatu perubahan. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaum berwenang saat ini, mereka memanfaatkan jabatan mereka sebagai jalan untuk memulai suatu sistem politik yang bersifat Nepotisme. "Aku yang berkuasa akan memberikan kekuasaan itu kepada keturunanku" inilah selogan yang ditengah dijalani masyarakat Indonesia saat ini.

Dalam demokrasi dan seluruh proses politik di Indonesia yang menjadi pemimpin

ialah masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa kekuasaan itu berada dalam tangan penguasa. Ini adalah sebuah nepotisme yang sangat memilukan masyarakat umum. Seorang penguasa hasil dari tindakan nepotisme tidak akan membawa perubahan. Seorang pemimpin seperti itu tidak memiliki bobot yang baik sebagai seorang pemimpin. Tata kelola pemerintahan yang baik, kekuasaan hukum, transparansi dan kesetaraan merupakan jargon-jargon inti dalam politik liberalisme. Kesetaraan derajat dalam sebuah pertarungan politik merupakan suatu hal yang wajar, tetapi dalam realitas yang dialami oleh negara Indonesia saat ini merupakan suatu perubahan yang esensial dan membawa perubahan baru dalam berdemokrasi. Perubahan yang mendasar yang terjadi saat ini adalah berlakunya nepotisme dalam berpolitik. Jika ditelisik dari sudut pandang moral-hukum, pemilu yang telah terjadi bukanlah hal etis secara moral pun secara hukum tidak sah. Akan tetapi, karena adanya kekuasaan maka antara moral dan hukum tidak berlaku. Keberpihakan yang berkuasa dalam hal ini sangatlah menonjol. Melihat realitas diatas, antara kebebasan dan kesetaraan dalam berpolitik sangatlah bertentangan. Dalam artian bahwa, individu yang memiliki kekuasaan melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada kaum proletar demi kepentingan pribadi dan kelompok. Akan tetapi, tindakan ini menimbulkan suatu problem yang amat besar dalam sebuah tatanan negara, terutama negara Indonesia. Kesetaraan dalam berpolitik ditiadakan dan memilih jalan baru yaitu adanya nepotisme dalam berpolitik. Nepotisme adalah sebuah problem yang selalu digaungkan oleh segenap masyarakat Indonesia saat ini. Paham Nepotisme ini merupakan sebuah gaya baru dalam sistem perpolitikkkan di Indonesia saat ini. Ketidaksetaraan dalam hal ekonomi adalah problem yang amat dasar dalam sistem perpolitikkkan di Indonesia saat ini. Selain itu, dalam sidang gugatan hak angket pemilu 2024, begitu banyak gugatan publik yang menyamapikan bahwa apa yang telah terjadi saat ini di Indonesia semata-mata karena adanya kesalahan dalam menggunakan kekuasaan serta kebebasan politik yang berorientasi pada kepentingan individu dan kelompok. Bagi Anies Baswedan, hal ini diakibatkan oleh adanya intervensi kekuasaan. Hal ini didukung oleh gugatan Mahfud MD dalam sidang perdana sengketa pilpers. Mahfud mengatakan bahwa apa yang telah terjadi dengan demokrasi saat ini mesti diperbaiki jangan membiarkan hal itu menjadi persepsi kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan, yang dekat dengan kekuasaan dan juga yang mempunyai uang berlimpah. Bentuk politik seperti ini merupakan sesuatu yang berseberangan dengan nilai moral. Berpolitik itu mesti mencakup etika dan nilai moral. Hal ini jelas terlihat sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai sekarang. Dalamnya berbagai kasus atau peristiwa politik yang memperlihatkan bahwa cara-cara berpolitik di Indonesia cenderung menganut paham pemisahan realitas dari moralitas . Etika dan nilai moral merupakan sesuatu yang esensial dalam berurusan dengan politik dan kekuasaan.

## **KESIMPULAN**

Kesetaraan dan kebebasan dalam berpolitik saat ini sungguh menjadi problem yang tengah terjadi di Indonesia. Kesetaraan dalam menyuarakan pendapat dan keinginan untuk menjadi seorang pemimpin telah ditelan oleh adanya hasrat duniawi semata demi kekuasaa. Oligarki serta Nepotisme adalah dua kasus yang amat besar bagi pemilu 2024 ini. Semuanya semata-mata demi kekuasaa. Dengan menghalalkan segala cara, kaum elit politik seperti, kaum Oligarki dan paham Nepotisem menggerus sistem demokrasi Inonesia. Tentunya hal ini berdampak pada demokrasi Indonesia serta segenap warga negara Indonesia.

Dengan demikian, antara kebebasan dan kesetaraan telah menjadi masalah besar dalam ziarah demokrasi Indonesia. Kedua hal diatas bukan lagi menjadi tombak dasar dari demokrasi, melainkan hal yang selalu dipertentangkan hingga saat ini. Problem demokrasi yang telah terjadi merupakan masalah moral yang selalu menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Akademika, Problematic Oligarki Di Indonesia, hlm 19

Afif Afthonul, Eudaimonisme, (penerbit: IRCiSoD, cetakan I 2023), hlm 7

Hohoitimur Yong, pelaksanaan otonomi daerah: berpeganglah pada erika politik, (Yogyakarta, 2003),

Kleden, Paul Budi Bukan Doping Politik, (Maumere, penerbit: Ledalero), hlm 31

<https://jurnalunpri.ac.id/index.php/lo/article/view/6/4>, Intan Rachmina, Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia,

<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3189>, Ulfah Nury Batubara, Royhanun Siregar, Nabilah Siregar, Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan,